

IMPLEMENTASI TUGAS KOMITE SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN MUTU PELAYANAN PENDIDIKAN DI SMA NEGERI 2 KABUPATEN SARMI

ALTON MATAPUTUN

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Cenderawasih
email: altonmatapapua@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji pelaksanaan tugas komite sekolah, yaitu (1) memberikan pertimbangan dalam menentukan dan menerapkan kebijakan pendidikan, (2) menggalang dana dan sumber daya pendidikan, (3) mengevaluasi layanan pendidikan di sekolah, dan (4) menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Penelitian ini juga menggambarkan faktor-faktor pendukung dan hambatan dalam pelaksanaan tugas komite sekolah dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Ini adalah penelitian kualitatif deskriptif berdasarkan studi kasus dengan menggunakan metode analisis model Huberman and Miles. Informan terdiri dari komite sekolah, orang tua, kepala sekolah, guru dan siswa. Instrumen penelitian adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi data guru dan sekolah. Validitas teknik data melalui perpanjangan periode pengamatan, kegigihan pengamatan, triangulasi, dan peer review. Hasil penelitian adalah (1) komite sekolah telah melaksanakan tugas pada acara sekolah meskipun tidak pada tingkat yang ideal, (2) kegiatan penggalangan dana masih tergantung pada upaya internal sekolah, (3) komite sekolah telah memberikan pertimbangan tentang masalah sekolah, pengambilan keputusan, dan pemantauan layanan sekolah. (4) Komite sekolah telah menindaklanjuti keluhan, target, kritik, dan aspirasi dari para siswa, orang tua dan masyarakat serta mengevaluasi kinerja sekolah. Hasil penelitian kedua mengenai faktor pendukung komite sekolah dalam melaksanakan tugasnya adalah ketersediaan sumber daya manusia di komite, fasilitas dan lingkungan sekolah yang mendukung. Namun, kendala seperti anggota aktif komite, kurangnya pemahaman tentang peran komite sekolah, dan perspektif orang tua tentang sistem pendidikan gratis.

Kata Kunci: Komite Sekolah, Kualitas, Layanan Pendidikan

ABSTRACT

The purposes of this study were to describe the implementation of school committee tasks, which are (1) giving consideration in determining and implementing educational policies, (2) raising funds and educational resources, (3) evaluating education services in schools, and (4) following up on community aspirations. This study also described the supporting factors and obstacles in the implementation of school committee tasks in improving the quality of education services. This was a qualitative descriptive research based on a study case using Huberman and Miles model. The informants consisted of school committee, parents, the headmaster, teachers and students. The results of the research were (1) school committee had implemented the duties at the school even though it is not at the ideal degree, (2) the fundraising activities still depended on internal efforts of the school, (3) particularly the school committee has provided considerations on school matters, decision making, and monitoring of school services, (4) The school committee had followed up complaints, targets, criticisms, and aspirations from the students, parents and societies as well as evaluate school performance. The second research resulted regarding the supporting factors of school committee in implementing their duties is the human resource availability in the committee, facilities and supportive school environment. However, the hindrances such as inactive members of the committee, lack of understanding on roles of school committee, and the perspectives of parents on free education system.

Key Words: School Committee, Quality, Education Services

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari hidup dan kehidupan manusia. Pendidikan yang paling utama bagi manusia untuk dapat berkomunikasi dan berinteraksi dengan sesama dalam berbagai aspek kehidupan. Pemerintah melakukan berbagai kebijakan dan upaya dalam rangka ketersediaan dan pemenuhan standar pelayanan pendidikan. Diantara upaya tersebut adalah mengotimalkan keterlibatan orang tua dan masyarakat bersama pemerintah untuk membangun pendidikan pada tingkat kabupaten/kota dan sekolah dalam suatu wadah. Atas gagasan dan pemikiran tersebut, sejak tahun 2002 telah ditetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 004/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Kedua wadah ini akan membantu pemerintah dalam menyediakan pelayanan pendidikan yang bermutu bagi masyarakat pada tingkat kab/kota dan sekolah.

Pada perkembangannya untuk menjamin mutu pelayanan dari komite sekolah, maka pemerintah membuat rambu-rambu sebagai tolok ukur kinerja komite sekolah dan telah diatur dalam Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 bahwa komite sekolah mempunyai tugas dan tanggungjawab seperti, (1) memberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan, (Kebijakan dan program, Rencana Kegiatan dan

Anggaran Sekolah (RAPBS/RKAS), kriteria kinerja sekolah, kriteria fasilitas pendidikan, kriteria kerja sama sekolah), (2) menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat, (3) mengawasi pelayanan pendidikan di sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan (4) menindaklanjuti keluhan, saran, kritik dan aspirasi peserta didik, orangtua/wali dan masyarakat.

Pemerintah bersama kalangan orangtua dan masyarakat terus berupaya mewujudkan amanat tersebut melalui berbagai usaha pembangunan pendidikan yang lebih berkualitas antara lain melalui pengembangan dan perbaikan kurikulum dan sistem evaluasi, perbaikan sarana pendidikan, pengembangan dan pengadaan materi ajar, serta pelatihan bagi guru dan tenaga kependidikan lainnya, namun pada kenyataannya upaya pemerintah tersebut belum cukup berarti dalam meningkatkan mutu pelayanan pendidikan. Masih dijumpai persoalan keterbatasan dan jangkauan sekolah dalam memenuhi kebutuhan sekolah, sehingga dalam beberapa kasus sekolah belum maksimal memberi pelayanan terbaiknya bagi masyarakat. Keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan pada jenjang SD, SLTP, dan SLTA yang tidak memperlihatkan peningkatan dan kemajuan yang berarti bahkan dapat dikatakan konstan dari tahun ke tahun, kecuali pada beberapa sekolah dengan jumlah yang relatif sangat kecil.

Keterbatasan pemerintah/sekolah dalam menjamin mutu layanan pendidikan di atas, menggambarkan bahwa diperlukan orang lain terutama pihak berkepentingan langsung yaitu siswa/ orang tua dan pengguna jasa pendidikan lainnya untuk bersama-sama meningkatkan mutu pelayanan pendidikan di sekolah-sekolah terutama pada wilayah/daerah yang sangat membutuhkan. Kehadiran komite sekolah sebagai salah satu wadah yang telah memiliki legalitas hukum, diharapkan dapat memperkecil persoalan pemenuhan kebutuhan pendidikan sekaligus sebagai alat dan mediasi dengan pihak-pihak terkait dalam upaya menyediakan layanan pendidikan bermutu di sekolah. Namun dalam beberapa kasus yang ada di sekolah, belum menunjukkan hasil maksimal seperti hasil penelitian Hasan (2014) mengatakan bahwa komite sekolah kurang berperan dalam menentukan kebijakan sekolah. Peran komite sekolah hanya sebatas menerima laporan dari kepala sekolah. Komite sekolah kurang dilibatkan dalam hal mengambil kebijakan sekolah. Komite sekolah hanya dilibatkan saat pengumpulan dana dari masyarakat. Keterlibatan komite sekolah dalam pengembangan dan Implementasi program sekolah di SD Negeri 19 Banda Aceh hanya 36,37 %. Komite sekolah akan berfungsi penuh dilibatkan oleh pihak sekolah jika ada kaitannya dengan pendanaan sekolah yang memerlukan bantuan dari masyarakat.

Studi kasus yang dilakukan di Banda Aceh, tidak beda jauh dengan hasil yang terjadi di Papua lebih khusus di SMA Negeri 2 Kabupaten Sarmi. Hasil studi awal peneliti di SMA 2 Sarmi pada tanggal 08 November 2018 menunjukkan bahwa terdapat beberapa masalah antara lain keterbatasan tenaga guru, sehingga harus merekrut tenaga guru honorer dengan konsekuensi pembiayaan, penggalangan dana masih bersifat ke dalam (internal sekolah), Selain itu masalah yang krusial dikalangan orang tua dan masyarakat, yaitu *mindset* orang tua, komite sekolah, masyarakat tentang slogan pendidikan gratis di Kabupaten Sarmi, antara lain dapat memicu kurangnya keterlibatan orang tua dan masyarakat di sekolah-sekolah. Sementara dalam kenyataannya slogan tersebut tidak terealisasi secara maksimal. Perlu dipahami bahwa kebutuhan pendidikan/sekolah akan penyediaan kebutuhannya sangat banyak dan bervariasi. Tentu saja tidak semua kebutuhan sekolah dapat dipenuhi pemerintah, sehingga sangat logis kalau sekolah dan orangtua murid memerlukan dukungan berbagai pihak termasuk pihak masyarakat/swasta. Lebih lanjut dikemukakan pula dalam Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 bahwa masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan. Peranserta masyarakat sangat diperlukan dalam mengoptimalkan kualitas sekolah.

Mataputun, Implementasi Tugas Komite Sekolah ...

Setiap satuan pendidikan, diharapkan memperhatikan dan mengimplementasikan regulasi pendidikan di atas, dalam rangka menyediakan pelayanan pendidikan yang bermutu bagi masyarakatnya. Partisipasi masyarakat dimaksudkan diharapkan dapat memajukan kualitas belajar, meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan anak, meningkatkan keserasian kehidupan sekolah dengan kehidupan di masyarakat, memotivasi masyarakat dalam membantu program sekolah, dan mewujudkan tanggungjawab bersama antar pihak sekolah dan masyarakat terhadap kualitas pendidikan. Karena pendidikan berkualitas akan berkontribusi juga bagi masyarakat dan bermanfaat bagi kepentingan banyak orang. Begitu pula sebaliknya pendidikan tidak berkualitas, akan berdampak buruk bagi pengguna jasa dan masyarakat luas dalam berbagai dimensi pembangunan.

Pemikiran lain yang dikemukakan Syamsuddin (2018) bahwa (1) komite sekolah sebagai perangkat yang ikut serta dan bertanggung jawab terhadap kepentingan setiap sekolah. Tanggungjawab yang dimaksud adalah untuk membantu sekolah mencari jalan keluar terhadap apa saja yang dihadapi sekolah. (2) Komite sekolah merupakan badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam meningkatkan mutu, pemerataan pendidikan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan baik pada pendidikan prasekolah, jalur

pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah. (3) Pelaksanaan kurikulum di sekolah tidak terlepas dari dukungan komite sekolah. Minimal dalam persoalan-persoalan penyediaan sarana dan prasarana pendukung dalam pelaksanaan kurikulum di sekolah.

Sekolah-sekolah yang memiliki visi dan misi yang jelas di era revolusi ini diharapkan dapat mengimplementasikan rambu-rambu kinerja komite yang telah digariskan dalam regulasi maupun dari pemikiran dan/atau pendapat ahli dalam penjelsan sebelumnya, seperti yang dicontohkan SMK Negeri 2 dan SMK Negeri 3 Tasikmalaya, yang diteliti oleh Surjana (2017), menunjukkan bahwa komite sekolah telah memahami fungsi dan peran komite sekolah dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran sekolah yang cukup baik dalam menganalisis, mengantisipasi permasalahan mengkoordinasikan dan mengintegrasikan semua kegiatan sekolah sehingga tujuan sekolah tercapai.

Komite sekolah cukup baik dalam menggalang dana dari masyarakat serta menjalin komunikasi dan kerja sama dengan orang tua siswa dan tokoh masyarakat guna mengembangkan mutu pendidikan sekolah. Komite sekolah cukup baik dalam membina hubungan dengan masyarakat serta menjalin komunikasi dan kerja sama dengan tenaga pendidik, orang tua siswa dan tokoh masyarakat dalam mengembangkan mutu pendidikan sekolah.

Contoh kasus di Tasikmalaya, diharapkan dapat menginspirasi satuan pendidikan lainya dalam meningkatkan pelayanan pendidikan. Setiap personal komite sekolah wajib memahami tugas dan fungsi mereka dalam berbagai kepentingan sekolah, mulai perencanaan kebijakan, pelaksanaan, sampai pada tataran evaluasi dan tindaklanjut. Kehadiran komite sekolah tidak hanya sekedar tandatangan surat menyurat terutama dalam melegalkan uang komite sekolah, tetapi sejak awal perencanaan pengembangan sekolah, kepala sekolah mengundang mitranya (komite sekolah) sebagai representatif masyarakat di sekolah. Komite sekolah turut serta dalam pengambilan kebijakan-kebijakan pengelolaan sekolah. Dengan demikian sekolah dan komite sekolah memiliki visi dan misi yang sama dalam melakukan berbagai terobosan dan/atau upaya memajukan sekolah, bukan sebaliknya, komite sekolah punya program tersendiri yang berbeda visi dan misi sekolah. Jadi, kehadiran komite sekola sebagai wadah yang memediasi aspirasi masyarakat dalam memajukan pendidikan. Makin berdaya komite sekolah diharapkan pula akan semakin baik pelayanan pendidikan yang secara langsung dan tidak langsung akan berdampak terhadap mutu lulusan. Berdasarkan beberapa pemikiran tersebut, maka peneliti merasa terpanggil untuk melakukan kajian lebih mendalam tentang implementasi tugas komite sekolah dalam peningkatan mutu

pelayanan pendidikan di SMA Negeri 2 Kabupaten Sarmi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif rancangan studi kasus. Ciri pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Peneliti memahami secara empirik implementasi tugas komite sekolah dalam meningkatkan mutu pelayanan pendidikan pada tempat penelitian sampai pada tingkat kejenuhan data, dan selama proses itu pula dilakukan kategorisasi (Sugiyono, 2002).

Sumber data dalam penelitian ini sebagai informan yaitu komite sekolah, orangtua murid, kepala sekolah, guru-guru, murid-murid, dan pengawas satuan pendidikan Kabupaten Sarmi. Sumber data lain seperti gambar, gedung, lingkungan, hasil rapat komite, profil sekolah, dan akreditasi sekolah. Data diperoleh dari hasil observasi partisipatif, wawancara mendalam, pengecekan dokumentasi, dan peneliti sebagai instrumen utama didukung dengan pedoman wawancara. Observasi, dan daftar pengecekan dokumentasi.

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan sejak memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Menurut Sugiyono (2013) bahwa analisis data telah dimulai sejak merumuskan dan

Mataputun, Implementasi Tugas Komite Sekolah ...

menjelaskan masalah, sebelum terjun ke dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Data dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan model interaktif menurut Miles dan Huberman (2009), yaitu (1) reduksi data, (2) penyajian data, dan (3) penarikan kesimpulan/verifikasi. Untuk menguji validitas data digunakan menggunakan kriteria derajat kepercayaan (*credibility*), dengan cara memperpanjang waktu pengamatan, ketekunan pengamatan, triangulasi, dan pengecekan teman sejawat. Cara-cara tersebut dilakukan agar tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan yang sesungguhnya terjadi di lapangan (Sugiyono, 2002).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berdasarkan analisis data dapat dikemukakan bahwa secara umum komite sekolah telah mengimplementasikan tugas-tugasnya dalam meningkatkan mutu pelayanan pendidikan di SMA Negeri 2 Sarmi, walaupun belum maksimal. Secara khusus komite sekolah telah melaksanakan hal-hal berikut, yaitu (1) memberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan seperti dalam penyusunan program, RAPBS/RKAS, kriteria kinerja sekolah, kriteria fasilitas pendidikan, kriteria kerja sama sekolah, (2) menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat, (3) mengawasi pelayanan

pendidikan di sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan (4) menindaklanjuti keluhan, saran, kritik dan aspirasi peserta didik, orangtua/wali dan masyarakat dengan belum maksimal membantu pemerintah/sekolah dalam pembangunan pendidikan di sekolah. Komite sekolah belum memperhatikan dan melaksanakan sepenuhnya tugas-tugasnya sebagaimana yang telah diatur dalam Permendikbud Nomor 75 tahun 2016.

Hasil penelitian ini relatif sama dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan Arlis (2013) menunjukkan bahwa kemampuan komite sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan antara lain melakukan identifikasi sumber daya pendidikan dengan cara memantau perkembangan sumber daya masyarakat agar dapat direkomendasikan menjadi calon tenaga pengajar di sekolah, memberikan masukan RAPBS, menyelenggarakan rapat RAPBS, memberikan pertimbangan dan perubahan RAPBS, dan ikut mensahkan RAPBS bersama kepala sekolah; (2) Motivasi komite sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan antara lain mengelola sumber daya pendidikan melalui koordinasi dengan kepala sekolah dan dewan guru. Adapun pemantauan dan evaluasi terhadap sarana dan prasarana sekolah dilakukan dengan menerima hasil laporan wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana, dan (3) Tanggung jawab komite sekolah dalam

penyelenggaraan pendidikan dilakukan dengan cara mengontrol keputusan pada setiap kebijakan yang dirumuskan oleh kepala sekolah dan mengontrol pelaksanaan program sekolah melalui pengawasan terhadap organisasi sekolah. Secara khusus hasil penelitian ini dipaparkan 5 (lima) fokus penelitian ini, yaitu:

Pertama, Komite sekolah telah mengimplementasikan tugas-tugasnya dalam memberi pertimbangan penentuan kebijakan dan program sekolah, RAPBS/RKAS, kriteria kinerja sekolah, fasilitas pendidikan di sekolah, dan kerja sama sekolah dengan pihak lain sudah terlaksana pada beberapa program dan kebijakan sekolah yaitu: menyusun tata tertib, menyusun RAPBS/RKAS, mengatur kriteria penerimaan guru honor, penyusunan program pembangunan laboratorium IPA dan komputer, menyusun jadwal tambahan jam belajar, menjalin kerja sama dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah.

Kedua, komite sekolah telah mengimplementasikan tugas penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat baik perorangan/organisasi/Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) maupun pemangku kepentingan lainnya kategori cukup. Penggalangan dana belum maksimal dan belum melibatkan semua komponen yang menjadi potensi sumber dana seperti diamanat pemerintah dalam Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 yaitu melibatkan

semua masyarakat baik perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri maupun pemangku kepentingan lainnya dalam menggalang dana untuk membantu dan menopang program dan kegiatan sekolah. Komite sekolah dalam menggalang dana bersifat internal sekolah Sekolah kurang mengakomodir dan mengoptimalkan semua potensi sumber daya yang diamanatkan oleh Permendikbud No. 75 Tahun 2016 yaitu kerja sama dengan DUDI, pengelolaan kantin sekolah, bantuan alumni dan lainnya.

Ketiga, komite sekolah telah mengimplementasikan tugas mengawasi pelayanan pendidikan di sekolah dengan cukup baik.

Keempat, komite sekolah telah menindaklanjuti keluhan, saran, kritik dan aspirasi peserta didik, orangtua/wali murid dan masyarakat dengan sangat baik. Komite sekolah memperhatikan dan mengakomodir beberapa usul dan saran bahkan kritik setiap pertemuan di sekolah dalam rapat sekolah dan rapat komite sekolah, sehingga kondisi ini berdampak bagi suasana dan kebersamaan dalam beberapa kegiatan, seperti kerja bakti membangun laboratorium IPA, kerja bakti, antusias dalam menghadiri rapat, membayar sumbangan komite, dan yang paling utama usul dan saran terkait dengan urusan legalitas tanah sekolah yang telah diselesaikan dengan pihak pemiliki ulayat dengan pihak tokoh adat (ondoafi). Persengketaan pihak sekolah dengan pihak adat terkait dengan status tanah

Mataputun, Implementasi Tugas Komite Sekolah ...

telah selesai dengan baik, atas upaya sekolah dengan mitranya (komite sekolah) bekerja sama dengan tokoh masyarakat/adat.

Kelima, Faktor pendukung implementasi tugas komite sekolah dalam meningkatkan mutu pelayanan pendidikan di SMA yaitu, ketersediaan SDM Komite sekolah dan saprasnya, dan lingkungan dan area sekolah yang kondusif. Hal ini sesuai dengan Permendiknas RI Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Bahwa dalam regulasi tersebut antara lain dipaparkan bahwa (1) Sekolah/Madrasah melibatkan warga dan masyarakat pendukung sekolah/madrasah dalam mengelola pendidikan. (2) Warga sekolah/madrasah dilibatkan dalam pengelolaan akademik (3) Masyarakat pendukung sekolah/madrasah dilibatkan dalam pengelolaan non-akademik, (4) Keterlibatan peranserta warga sekolah/madrasah dan masyarakat dalam pengelolaan dibatasi pada kegiatan tertentu yang ditetapkan, (5) Setiap sekolah/madrasah menjalin kemitraan dengan lembaga lain yang relevan, berkaitan dengan input, proses, output, dan pemanfaatan lulusan, (6) Kemitraan sekolah/madrasah dilakukan dengan lembaga pemerintah atau non-pemerintah.

Pembahasan

(a) **Pertama**, komite sekolah telah mengimplementasikan program perencanaan

sekolah, memberikan masukan terhadap penyusunan, perubahan dan pengesahan RAPBS, maupun memberikan gagasan dan masukan dalam penyusunan dan pelaksanaan program terkait dengan kriteria kinerja sekolah, kriteria fasilitas pendidikan disekolah dan kriteria kerja sama sekolah dengan pihak lain telah diwujudkan oleh Komite SMA Negeri 2 Sarmi. Temuan ini menunjukkan bahwa proses pendidikan di sekolah tersebut telah sesuai dengan amanat Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Bab IV pasal 1 yang menyebutkan bahwa masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Kurniawan (2011) mengatakan bahwa komite sekolah telah melaksanakan perannya sebagai badan pertimbangan. Komite SMA Negeri 2 Sarmi menjalankan tugasnya dengan amanat pemerintah dalam Permendikbud No 75 Tahun 2016 tertuang dalam indikator kinerja komite sekolah yang disusun oleh Tim Pengembangan Komite Sekolah Ditjen Dikdasmen khususnya tentang peran komite sekolah sebagai badan pendukung dalam memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan. Beberapa program dan kebijakan yang belum terlaksanan yaitu, merevisi silabus, menyusun kriteria kepala sekolah. Hasil penelitian ini tidak jauh berbeda dengan hasil penelitian Minto dan Habel (2016) Peran komite sekolah

dalam meningkatkan Manajemen Berbasis Sekolah di SMA Negeri 1 Kurik kurang maksimal.

(b) Kedua, Kepala sekolah sebagai penanggungjawab pendidikan di sekolah diharapkan dapat memaksimalkan sumber daya yang ada di lingkungan sekolah, seperti dikemukakan Mataputun, (2016) bahwa untuk meningkatkan kinerja sekolah, kepala sekolah dapat melakukan berbagai upaya untuk menggerakkan semua sumber daya, berkolaborasi dengan *stakeholder*, memiliki semangat belajar tinggi dengan mengikuti berbagai aktivitas pengembangan diri terutama dalam mengantisipasi perubahan di lingkungan sekolah, menginspirasi semua anggota organisasi mengacu pada nilai agama dan nilai nilai organisasi. Jika ciri dan atau karakter ini diterapkan dengan baik, kinerja sekolah meningkat dan akan berimplikasi terhadap prestasi akademik dan non akademik sekolah.

(c) Ketiga, Pengawasan komite terintegrasi dengan kegiatan rapat sekolah/komite dan melalui laporan dari pihak sekolah. Tugas pengawasan komite sekolah yang sering dilakukan dan lebih bersifat rutinitas, yaitu penandatanganan RAPBS/RKAS oleh komite sekolah dan kepala sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa, sejak awal komite sekolah terlibat dalam perencanaan anggaran dan pendapatan sekolah serta mengawasi pengelolaan keuangan sekolah. Diharapkan dengan tugas seperti ini dapat meminimalkan

hal-hal yang tidak diinginkan dan dapat menciptakan organisasi sehat. Antara kepala sekolah dan komponen sekolah lainnya dapat menjalin hubungan yang kondusif dan produktif dan tidak saling curiga dengan pertanggungjawaban kegiatan dan pendanaanya misalnya dana pertanggungjawaban dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), penggunaan dan pemanfaatan dana komite sekolah, anggaran yang digunakan untuk pembangunan fasilitas-fasilitas sekolah seperti pembangunan ruang laboratorium komputer dan IPA.

(d) Keempat, Hubungan yang baik antara komite dengan sekolah membuka ruang bagi keduanya dalam upaya menampung keluhan, saran, kritik dan aspirasi dari *stakeholders* untuk peningkatan mutu pelayanan di sekolah. Hal ini sejalan dengan amanat pemerintah melalui Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang komite sekolah, seperti pada pasal 3 poin d, yang pada intinya mengatakan bahwa tugas komite diharapkan dapat menindaklanjuti berbagai hal terkait dengan upaya peningkatan pelayanan pendidikan. Hasil penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa kinerja komite SMA Negeri 2 Sarmi dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai badan penghubung (*mediator agency*) sudah terlaksana. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan Mataputun (2007) bahwa untuk mengembangkan kerja sama serta mengawasi proses/program pendidikan diperlukan penyelenggara-

Mataputun, Implementasi Tugas Komite Sekolah ...

penyelenggara pendidikan (administrator, guru, sumber daya pendukung lainnya, termasuk yang berasal dari masyarakat) yang benar-benar handal, berdedikasi tinggi, inovatif, kreatif, dan menerapkan manajemen terbuka bagi komponen sekolah/pemerintah, masyarakat dan orang tua murid.

(e) **Kelima**, dalam mengimplementasikan tugas komite sekolah dalam meningkatkan mutu pelayanan pendidikan di SMA Negeri 2 Sarmi, diperhadapkan dengan sejumlah kendala, antara lain (1) kesibukan pribadi/pengurus di luar program komite (2) belum semua pengurus komite sekolah terlibat, antara lain karena minim wawasan tentang organisasi komite sekolah, (3) *meadsed* orang tua terpengaruh dengan slogan politik "Pendidikan gratis" sehingga ada orang tua tidak mau membayar sumbangan karena beranggapan bahwa biaya sekolah sudah ditanggulangi dengan dana BOS. Hal ini tidak sejalan dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 bahwa pendidikan menjadi tanggungjawab bersama pemerintah, orang tua, dan masyarakat, dan dikokohkan dalam Permendikbud Nomor 75 tahun 2016 tentang komite sekolah pasal 1 poin 2 dikatakan bahwa Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggota orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan. Berdasarkan pasal ini, maka orang-orang yang ada dalam barisan komite sekolah, mestinya orang yang terpanggil melayani

pendidikan dengan tulus, sehingga mereka dapat memberi dan menjatahkan waktu dan pikirannya bersama-sama dengan kepala sekolah untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan di SMA Negeri 2 Sarmi.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa secara umum komite sekolah telah melaksanakan tugas-tugasnya di SMA Negeri 2 Sarmi sebagaimana yang telah diatur dalam Permendikbud Nomor 75 tahun 2016 hanya saja belum maksimal. Secara khusus komite sekolah telah berbagai hal berikut, (1) memberi pertimbangan menentukan kebijakan dan program sekolah, RAPBS/RKAS, kriteria kinerja sekolah, fasilitas pendidikan di sekolah, dan kerjasama sekolah dengan pihak lain, mengatur kriteria penerimaan guru honor, penyusunan program pembangunan laboratorium IPA dan komputer, menyusun jadwal tambahan jam belajar, menjalin kerja sama dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah, Komite sekolah telah melaksanakan program perencanaan sekolah, memberikan masukan terhadap penyusunan, perubahan dan pengesahan RAPBS/RKAS, memberikan gagasan dan masukan dalam penyusunan dan pelaksanaan program terkait dengan kriteria kinerja sekolah, kriteria fasilitas pendidikan di sekolah dan kriteria kerja sama sekolah dengan pihak lain telah diwujudkan oleh Komite SMA Negeri 2 Sarmi,

(2) komite sekolah telah melaksanakan tugas untuk menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat baik perorangan /organisasi/DUDI maupun pemangku kepentingan lainnya cukup baik, walaupun belum secara maksimal dapat melibatkan semua komponen terlibat, (3) komite sekolah telah melaksanakan tugas untuk mengawasi pelayanan pendidikan di sekolah seperti ikut dalam rapat dalam penyusunan RAPBS/RKAS dan sekaligus menandatangani, merencanakan anggaran dan pendapatan sekolah serta turut mengawasi pengelolaan keuangan sekolah, (4) komite sekolah telah menindaklanjuti keluhan, saran, kritik dan aspirasi peserta didik, orangtua/wali siswa dan masyarakat dengan baik. Hal ini terlihat dari tingkat partisipasi orang tua dalam menghadiri rapat sangat tinggi, membayar uang iuran komite, partisipasi orang tua/wali dalam kegiatan kerja bakti untuk membantu penyelesaian pekerjaan di sekolah. Hubungan yang baik antara komite dengan sekolah membuka ruang bagi keduanya dalam upaya menampung keluhan, saran, kritik dan aspirasi dari *stakeholder* (pemangku kepentingan) dalam rangka peningkatan mutu pelayanan pendidikan, (5) yang menjadi faktor pendukung implementasi tugas-tugas komite sekolah, diantaranya ketersediaan SDM, adanya kerja sama dengan sekolah, area lingkungan sekolah. Sedangkan faktor penghambatnya tingkat kesibukan pribadi dari

masing-masing pengurus komite sekolah, kurangnya wawasan tentang peran komite sekolah, dan adanya *mindset* orang tua yang terpengaruh oleh slogan politik “pendidikan gratis”.

Berdasarkan simpulan sebelumnya, maka dapat disarankan beberapa hal, yaitu Apa yang telah dilaksanakan komite sekolah selama ini dalam rangka penyediaan layanan pendidikan di SMA Negeri 2 Sarmi dapat dipertahankan dan ditingkatkan. Hal-hal yang kurang optimal dapat ditindaklanjuti, misalnya penyusunan merevisi silabus, menyusun kriteria kepala sekolah, pengembangan kerja sama dengan masyarakat yang lebih luas dalam berbagai kebutuhan sekolah, seperti penggalangan dana tidak saja hanya internal sekolah tetapi masyarakat/DUDI dan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler, Pentingnya sosialisasi peran dan tugas komite serta penjelasan terkait dengan slogan pendidikan gratis dari pemerintah daerah, sehingga sekolah, komite, dan masyarakat memiliki pemahaman yang sama terkait dukungannya dalam meningkatkan pelayanan pendidikan di SMA Negeri 2 Sarmi. Selain itu bagi peneliti lain, dapat mengembangkan indikator penelitian ini dalam berbagai pendekatan ilmiah, agar diperoleh referensi yang lebih mutakhir terkait dengan pengembangan keilmuan tata kelola pendidikan umumnya dan satuan pendidikan khususnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arlis, M. 2013. Kinerja Komite Sekolah dalam Penyelenggaraan Pendidikan pada SMPN 8 Kota Banda Aceh. *Jurnal Serambi Ilmu*. 16 (1): 29-38.
- Hasan, H. 2014. Fungsi Komite Sekolah dalam perkembangan dan Implementasi Program Sekolah di SD Negeri 19 Kota Banda Ace. *Jurnal Pesona Dasar*. 2 (3): 1-12.
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 004/U/2002. *tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah*.
- Kurniawan, B. 2011. *Peran Komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan Sekolah Pembangunan UIN*. [https://www.google.co.id.repository.uinjkt.ac.id](https://www.google.co.id/repository.uinjkt.ac.id). Diakses tanggal 20 Mei 2018.
- Mataputun, Y. 2016. Kepemimpinan Transformasional Kepala Sekolah dalam meningkatkan kinerja sekolah. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan. Standarisasi KKNI, program studi manajemen/administrasi pendidikan dalam rangka peningkatan kompetensi kepala sekolah dan pengawas di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN*. 12-13 November 2016 Bengkulu, Hal. 575-578.
- Mataputun, Y. 2007. Pengembangan Kerja sama sekolah dengan masyarakat dalam pengembangan pendidikan. *Jurnal Ilmu Pendidikan* 5 (2): 83-93.
- Milles, M. B. dan Huberman, A.M. 2009. *Analisis Data Kualitatif*. (Cjetjep Rohendi Rohidi, Penerjemah) Jakarta: UI Press.
- Minto, A., dan Habel S. 2016. Peran Komite Sekolah dalam meningkatkan MBS di SMA Negeri 1 Kurik Kabupaten Merauke. *Tesis Magister Manajemen Pendidikan FKIP Uncen Jayapura Papua*.
- Permendikbud (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan) Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016. *tentang Komite Sekolah*.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang *Standar pengelolaan pendidikan dasar dan menengah*.
- Surjana, L. 2017. Fungsi dan Peran Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan: Studi di SMK Negeri 2 dan SMK Negeri 3 Tasikmalaya. *Indonesian Journal of Education Management and Administration*. 1 (2): 120-124.
- Sugiyono. 2013. *Memahami penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.
- Syamsuddin. 2018. Peran Komite Sekolah terhadap Penerapan Kurikulum. *Jurnal Idaarah*. 2(1): 86-98.
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*.